

KOP PERUSAHAAN

Jakarta,

Nomor	:	Kepada
Lampiran	:	Yth. Kepala Badan Pelayanan Terpadu
Perihal	: Permohonan Izin Pembukaan/ Perpanjangan/Perubahan Kantor Perwakilan Asing Bidang Minyak dan Gas (Migas)	Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta di Tempat

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 62 Tahun 2011 tentang "Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi", dengan ini kami mengajukan permohonan izin pembukaan/perpanjangan/perubahan* Kantor Perwakilan Asing sektor Migas.

Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami lampirkan :

1. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 tentang kebenaran data dan keabsahan data;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA dan Paspor;
3. Kartu Keluarga (KK);
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:
 - a. Kemenkumham, jika PT dan Yayasan;
 - b. Kementrian/Dinas Koperasi, jika Koperasi;
 - c. Pengadilan Negeri, jika CV;
6. Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan;
7. NPWP Badan Hukum;
8. Surat kuasa di atas kertas bermaterai Rp 6.000;
9. Izin Gangguan (ITU UUG atau HO) [Fotokopi];
10. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) [Fotokopi] 3. Dokumen Lingkungan [Fotokopi];
11. Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Asing (KPA) bidang minyak dan gas terdahulu jika perpanjangan;
12. Surat keterangan terdaftar (Business Registrasi Certificate) atau sejenis dari negara asal;
13. Rekomendasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara asal yang berisi nama dan alamat perusahaan, nama pemilik dan dewan direksi, kantor perwakilan perusahaan di negara lain, dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di Indonesia;
14. Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
15. Surat kuasa untuk kepala kantor perwakilan dari pimpinan perusahaan kantor pusat;
16. Proposal teknis yang dilengkapi dengan:
 - a. Bagan organisasi kantor pusat dan kantor perwakilan di Indonesia;
 - b. Rencana kegiatan kantor perwakilan atau realisasi kegiatan di Indonesia;
 - c. Sejarah perusahaan (company profile dan annual report);
 - d. Referensi bank dari negara asal;
 - e. Rekening bank atas nama kantor perwakilan di Jakarta

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta,

Pemohon
ttd + stempel

.....
(nama jelas & jabatan)

*NB : * (coret salah satu)*

*Jika terjadi perubahan pimpinan, wajib melampirkan **Surat Kuasa/Penunjukan untuk Kepala Kantor Perwakilan dari Pimpinan Perusahaan Kantor Pusat yang terbaru***

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Bidang Usaha :
Jenis Usaha :
Sub - Jenis Usaha :
Jabatan : Direktur Utama / Penanggung jawab

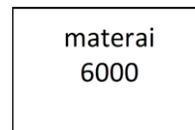
Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Segala data yang terdapat dalam dokumen permohonan ini adalah **Benar dan Sah**.
2. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Pemohon,



(.....)
Nama Jelas dan Tanda tangan